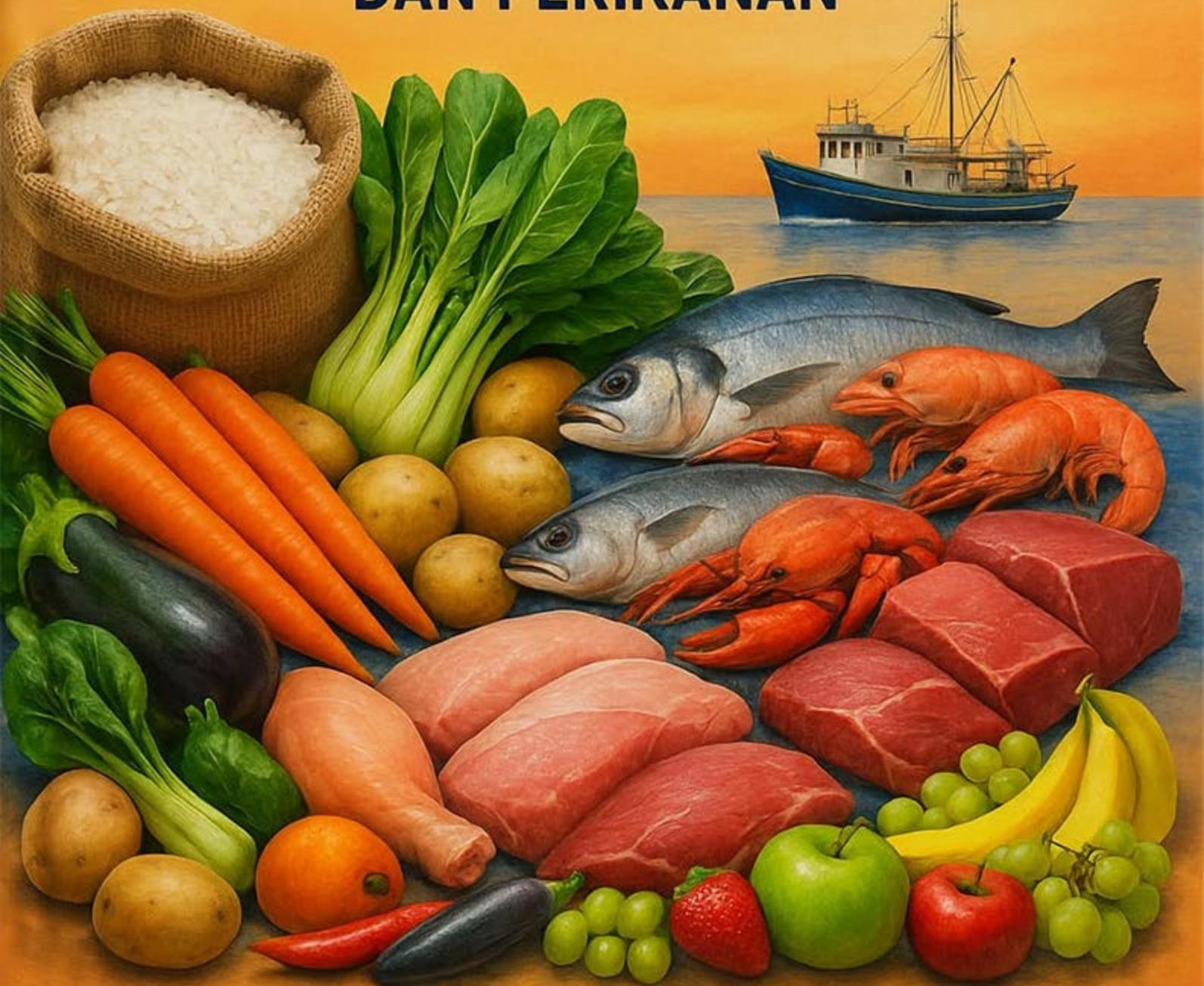




PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan tahun Kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, selama tiga tahun sebelumnya untuk peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2025 merupakan perjalanan tahun kedua untuk Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026 dalam mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pelaihari, Mei 2025

Kepala Dinas,



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
	2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III	TUJUAN DAN SARAN ERANGKAT DAERAH	14
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1 Program dan Kegiatan	16
		16
BAB V	PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu tolak ukur kegiatan perencanaan yang sifatnya dapat mengevaluasi/mengontrol kegiatan Pembangunan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan program kegiatan yang berpedoman pada :

1. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPD 2024 - 2026. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tanah laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan Rencana Kerja diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025 pada TW. I, review dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 pada TW. I sebagai acuan atau tolak ukur mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.5. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

BAB III TUJUAN DAN SARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berjalan sebagaimana yang diharapkan,

Pencapaian Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada Kinerja Pendapatan dari sasaran sebesar Rp. 116.000.000,- realisasi pendapatan sebesar Rp. 471.200.000,- atau sebesar 420,00%. Realisasi Belanja Operasi untuk Pelaksanaan Program dan kegiatan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan pada tahun anggaran 2023 terdapat sebanyak 9 (sembilan) Program, 19 (Sembilan Belas) kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan alokasi Anggaran total Rp. 15.662.260.353,- realisasinya sebesar Rp. 12.780.709.022,- atau 81,60%

Realisasi penggunaan sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Hibah) dan Belanja Modal (Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung dan Belanja Aset Tetap Lainnya) untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja output maupun outcome.

Kebijakan Umum anggaran Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 tertuang pada 9 Program, 19 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH
<i>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs
<i>Kegiatan Administrasi Umum</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
Pengadaan Mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
<i>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
<i>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<i>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
<i>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
<i>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
<i>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
<i>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
<i>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</i>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<i>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 mulai dari Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan, maupun Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) juga Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024 dan Capaian Program Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Ahkir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14 = 8 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kasakeriaan yang sesuai SOP*) (%)	0,00	25.517.252.603	100,00	-	100	9.939.630.661	1.996.981.745	1.705.386.498	1.882.598.085	2.475.462.313	100	8.060.428.641	100,00%	81,09%	100,00	8.060.428.641	0,00%	31,59%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	68.000.000	0,00	-	1	12.864.746	5.724.002	1.135.000	1.177.500	3.035.000	100	11.071.502	10000,00%	86,06%	100,00	11.071.502	0,00%	32,56%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (1)	34.000.000	0,00	-	4	8.041.879	3.423.500	-	367.500	3.035.000	5	6.826.000	100,00%	84,88%	5,00	6.826.000	0,00%	20,08%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	34.000.000	0,00	-	4	4.822.867	2.300.502	1.135.000	-	810.000	-	4	4.245.502	100,00%	88,03%	4,00	4.245.502	0,00%	12,49%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	17.799.739.561	0,00	-	1	5.159.952.247	1.124.689.069	1.332.448.902	1.039.974.519	1.201.041.043	100	4.698.153.533	10000,00%	91,05%	100,00	4.698.153.533	0,00%	48,51%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17.759.739.561	0,00	-	30	5.149.952.252	1.119.092.269	1.330.016.902	1.039.159.719	1.201.041.043	25	4.689.309.933	83,33%	91,06%	25,00	4.689.309.933	0,00%	26,40%					
		Pelaksanaan Penelausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penelausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	40.000.000	0,00	-	5	9.999.995	5.596.800	2.432.000	814.800	-	5	8.843.600	100,00%	88,44%	5,00	8.843.600	0,00%	22,11%					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	735.000.000	0,00	-	1	620.007.750	300.000.000	15.400.000	-	25	270.000.000	100,00%	94,42%	100,00	585.400.000	100,00%	106,41%					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	135.000.000	0,00	-	1	20.007.750	-	-	15.400.000	-	-	1	15.400.000	100,00%	76,97%	1,00	15.400.000	0,00%	11,41%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	600.000.000	0,00	-	100	600.000.000	300.000.000	-	-	-	45	270.000.000	95	570.000.000	95,00%	95,00%	95,00	570.000.000	0,00%	95,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	1.970.000.000	0,00	-	1	1.471.919.228	426.996.524	203.499.181	459.997.128	25	1.385.757.130	10000,00%	94,15%	100,00	1.385.757.130	100,00%	287,57%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	140.000.000	0,00	-	1	14.856.986	-	500.000	10.045.043	1	-	1	10.545.043	100,00%	70,98%	1,00	10.545.043	0,00%	7,53%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	340.000.000	0,00	-	14	443.228.709	7.335.000	4	97.574.850	7	290.069.706	3	21.800.000	100,00%	94,03%	14,00	416.779.556	0,00%	122,58%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	40.000.000	0,00	-	1	8.948.847	-	-	3.807.500	-	3.889.590	1	-	1	7.697.090	100,00%	86,01%	1,00	7.697.090	0,00%	19,24%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	40.000.000	0,00	-	1	13.456.311	840.000	-	2.770.000	-	2.152.000	1	2.052.000	1	7.814.000	100,00%	58,07%	1,00	7.814.000	0,00%	19,54%		

		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1)	100,00	-	0,00	-	1	770.873.271	25	4.555.000	25	264.564.000	25	182.538.000	25	232.985.828	100	684.642.828	10000,00%	88,81%	100,00	684.642.828	100,00%	0,00%
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)			0,00	-	2	443.821.405	-	-	1	217.900.000	-	500.000	-	197.313.000	1	415.713.000	50,00%	93,67%	1,00	415.713.000	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)			0,00	-	1	36.746.000	-	375.000	1	29.020.000	-	-	-	2.220.000	1	31.615.000	100,00%	86,04%	1,00	31.615.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)			0,00	-	1	290.305.866	-	4.180.000	-	17.644.000	1	182.038.000	-	33.452.828	1	237.314.828	100,00%	81,75%	1,00	237.314.828	0,00%	0,00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	71,21%	88,81%			
																					Predikat Kinerja	Sedang	Tinggi		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Ppemerintah (%)	0,00	-	100,00	-	100	1.414.187.612		50.246.400		574.166.030		129.449.844		221.080.000	100	974.942.274	100,00%	68,94%	100,00	974.942.274	0,00%	0,00%
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan/Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1)	100,00	-	0,00	-	1	412.118.099	25	14.535.000	25	31.745.000	25	21.625.000	25	55.755.000	100	123.660.000	10000,00%	30,01%	100,00	123.660.000	100,00%	0,00%
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)			0,00	-	1	25.795.760	-	-	-	3.000.000	-	4.285.000	1	13.550.000	1	20.835.000	100,00%	80,77%	1,00	20.835.000	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)			0,00	-	1	386.322.339	-	14.535.000	-	28.745.000	-	17.340.000	1	42.205.000	1	102.825.000	100,00%	26,62%	1,00	102.825.000	0,00%	0,00%
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (1)	100,00	-	0,00	-	1	663.056.200	25	1.616.400	25	470.798.930	25	53.017.050	25	18.180.000	100	543.612.380	10000,00%	81,99%	100,00	543.612.380	100,00%	0,00%
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)			0,00	-	40	604.773.000	-	-	40	461.932.150	-	39.750.000	-	950.000	40	502.632.150	100,00%	83,11%	40,00	502.632.150	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton)			0,00	-	7	58.283.200	-	1.616.400	-	8.866.780	-	13.267.050	7	17.230.000	7	40.980.230	100,00%	70,31%	7,00	40.980.230	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (1)	100,00	-	0,00	-	1	339.013.313	25	34.095.000	25	71.622.100	25	54.807.794	25	147.145.000	100	307.669.894	10000,00%	90,75%	100,00	307.669.894	100,00%	0,00%
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)			0,00	-	1	20.720.600	-	-	-	860.000	-	867.000	1	18.800.000	1	20.527.000	100,00%	99,07%	1,00	20.527.000	0,00%	0,00%

		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)			0,00		325	547.470.143					310	342.650.337	15	176.650.000	325	519.300.337	100,00%	94,85%	325,00	519.300.337	0,00%	0,00%
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	100,00		0,00		1	743.975.971	25	216.399.440	25		25	84.842.092	25	314.759.170	100	616.000.702	10000,00%	82,80%	100,00	616.000.702	100,00%	0,00%
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)			0,00		140	675.134.382	120	216.399.440	120		120	33.664.382	140	306.548.200	140	556.612.022	100,00%	82,44%	140,00	556.612.022	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Disiapkan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)			0,00		5	44.522.803					5	32.774.970		2.710.970	5	35.485.940	100,00%	79,70%	5,00	35.485.940	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Disiapkan Penyakuran Bantuan Per Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)			0,00		2	24.318.786					2	18.402.740		5.500.000	2	23.902.740	100,00%	98,29%	2,00	23.902.740	0,00%	0,00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	87,83%			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0,00		1457,00		1479	1.469.343.819		655.176.018		70.315.610		34.103.048		502.855.192	1.479	1.262.449.868	100,00%	85,92%	1457,00	1.262.449.868	0,00%	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Capaian Pemberdayaan Ikan kecil (1)	100,00		0,00		1	239.726.550	25	1.073.188	25	36.790.610	25	24.373.048	25	162.035.392	100	224.272.238	10000,00%	93,55%	100,00	224.272.238	100,00%	0,00%
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)			0,00		10	59.996.954		573.188		7.026.000	5	19.120.000	5	31.400.000	10	58.119.188	100,00%	96,87%	10,00	58.119.188	0,00%	0,00%
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)			0,00		2	179.729.596		500.000		29.764.610	1	5.253.048	1	130.635.392	2	166.153.050	100,00%	92,45%	2,00	166.153.050	0,00%	0,00%
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (1)	100,00		0,00		1	1.229.617.269	25	654.102.830	25	33.525.000	25	9.730.000	25	340.819.800	100	1.038.177.630	10000,00%	84,43%	100,00	1.038.177.630	100,00%	0,00%
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)			0,00		36	1.204.622.269	36	654.102.830	36	25.200.000	36		36	334.239.800	36	1.013.542.630	100,00%	84,14%	36,00	1.013.542.630	0,00%	0,00%
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)			0,00		20	24.995.000				8.325.000	20	9.730.000		6.580.000	20	24.635.000	100,00%	98,56%	20,00	24.635.000	0,00%	0,00%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	85,92%			
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (ton) (Ton)	0,00	375.000,00	68002,00		69022	121.207.862				8.325.000		44.423.000		64.872.500	69.022	117.620.500	100,00%	97,04%	68002,00	117.620.500		31,37%
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (1)	100,00	375.000,00	0,00		1	121.207.862	25		25	8.325.000	25	44.423.000	25	64.872.500	100	117.620.500	10000,00%	97,04%	100,00	117.620.500	100,00%	31,37%

	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		375.000.000	0,00	-	10	121.207.862	-	-	1	8.325.000	3	44.423.000	6	64.872.500	10	117.620.500	100,00%	97,04%	10,00	117.620.500	0,00%	31,37%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	97,04%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Hasil Olahan Perikanan (%)	0,00	-	1,50	-	1,5	167.077.197	3.655.000	47.075.000	63.171.000	30.790.000	2	144.691.000	100,00%	86,60%	1,50	144.691.000	0,00%							
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (1)	-	0,00	-	1	-	25	-	25	25	25	-	25	100	-	10000,00%	0,00%	100,00	-	0,00%	0,00%				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)		0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala (1)	100,00	-	0,00	-	1	167.077.197	25	3.655.000	25	47.075.000	25	63.171.000	25	30.790.000	100	144.691.000	10000,00%	86,60%	100,00	144.691.000	100,00%	0,00%		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	"Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perincian Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		0,00	-	25	167.077.197	2	3.655.000	15	47.075.000	8	63.171.000	-	30.790.000	25	144.691.000	100,00%	86,60%	25,00	144.691.000	0,00%	0,00%			
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	86,60%					
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
							15.662.260.353	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															78,86%	81,60%		
																					Tinggi	Tinggi				

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN I
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi/ Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi/ Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			46.068.500.000	-	6.512.818.245	1.329.615.943	-	-	-	-	-	-	-	1.329.615.943	20,42%	1.329.615.943	2,89%						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		110.000.000	0,00	1	9.528.096	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (tersusun*) ()		55.000.000	0,00	3	6.959.905	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4,00	55.000.000	0,00	4	2.568.191	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		31.063.000.000	0,00	1	4.930.370.918	-	1.124.338.296	-	-	-	-	-	1.124.338.296	0,00%	22,80%	0,00	1.124.338.296	0,00%	10,18%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30,00	31.000.000.000	0,00	25	4.923.310.608	25	1.120.198.296	-	-	-	-	25	1.120.198.296	100,00%	22,75%	25,00	1.120.198.296	83,33%	3,61%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5,00	63.000.000	0,00	4	7.060.310	1	4.140.000	-	-	-	-	1	4.140.000	25,00%	58,64%	1,00	4.140.000	20,00%	6,57%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		2.055.000.000	0,00	1	171.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	180.000.000	0,00	26	21.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50,00	1.875.000.000	0,00	25	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	6.115.500.000	0,00	1	319.352.670	-	59.105.737	-	-	-	-	-	59.105.737	0,00%	18,51%	0,00	59.105.737	0,00%	9,87%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	250.000.000	0,00	1	14.913.673	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14,00	1.750.000.000	0,00	7	110.355.341	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	250.000.000	0,00	1	15.466.141	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota (1)	100,00	-	0,00	-	1	608.777,913	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	1.350.000	0,00%	0,22%	0,00	1.350.000	0,00%	0,00%
		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)			0,00		10	608.777,913		1.350.000							1.350.000	0,00%	0,22%	0,00	1.350.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,22%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							108.432,198		3.150.000							3.150.000		2,91%		3.150.000	0,00%	0,00%
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala (1)	100,00	-	0,00	-	1	108.432,198	-	3.150.000	-	-	-	-	-	-	3.150.000	0,00%	2,91%	0,00	3.150.000	0,00%	0,00%
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)			0,00		25	108.432,198		3.150.000							3.150.000	0,00%	2,91%	0,00	3.150.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	2,91%			
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
								11.875.872,309											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	43,20%	12,22%			
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Analisis Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut meliputi berbagai Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang saling mendukung.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026, serta rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026, maka di lakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Lintas Sektor dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam target capaian

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan: Penguatan cadangan pangan 60%;
- b. Distribusi dan Akses Pangan: Ketersediaan informasi harga pangan di daerah 100%;
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan: Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80%;
- d. Penanganan Kerawanan Pangan: Penanganan daerah rawan pangan 60%.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang ketahanan pangan dan Perikanan, urusan pemerintahan provinsi dan tugas pemerintah pusat. Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di jabarkan dalam beberapa indikator yang mencakup kinerja pelayanan Dinas. Untuk data capaian dan target Indikator Pembangunan Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel TC.30

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

Bidang Ketahanan Pangan:

1. Masih kurangnya lumbung pangan masyarakat yang ada di sentra produksi padi;
2. Belum beragamnya pola konsumsi ketahanan pangan Masyarakat;
3. Keterbatasan kemampuan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan dan gizi.

Bidang Perikanan

1. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana budidaya dan penangkapan ikan;
2. Masih kurangnya penerapan ilmu dan teknologi bagi Pembudidaya Ikan;
3. Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan;
4. Masih banyaknya nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
5. Belum ada data yang akurat terkait produksi perikanan;
6. Belum optimalnya akses permodalan untuk nelayan;
7. Belum optimalnya penyaluran BBM solar nelayan bersubsidi secara merata.

Ada beberapa hal yang yang menjadi Isu penting tersebut diatas dapat dilaksanakan/terrealisasi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kedepan adalah :

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme;
4. Perlunya Penyuluhan dibidang teknis bagi pelaku usaha.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pelaku Usaha:

1. Diperbanyaknya Mengikuti Pelatihan, Magang, Kursus dan sejenisnya dibidang teknis untuk menambah ilmu sehingga mampu bersaing dan mandiri;
2. Mengikuti Pelatihan Manajemen Kewirausahaan;
3. Pelatihan pengoperasi tentang Internet (IT).

Sarana dan Prasarana :

1. Mengembangkan Teknologi dan Informasi (IT) tentang Usaha Ketahanan Pangan dan Perikanan.
2. Peremajaan Alat-alat usaha Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya dan petani, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam usulan rencana kegiatan Tahun Anggaran Perubahan 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengusulkan beberapa kegiatan Belanja Operasional yang terdiri dari 9 program dengan 19 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat pada anggaran perubahan tahun 2025 tidak ada usulan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL						

2.5. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel berikut ini :

REVIU RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. TANAH LAUT

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (Rp.)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (Rp.)	RENCANA PERGESERAN/ PENAMBAHAN (Rp.)	SELISIH Rp. (+/-)	KETERANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DKPP	82	Skor		6.690.784.940,40	6.491.173.245,02	1.702.946.841,00	6.808.211.636,02	-37.781.420,00			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	%		11.958.164,40	9.528.096,40	2.794.513,00	9.528.096,40	0,00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	3 Dokumen	6.959.905,40	6.959.905,40	1.907.000,00	6.959.905,40	0,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	0	4 Laporan	4.998.259,00	2.568.191,00	887.513,00	2.568.191,00	0,00		
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	100	%		4.932.136.211,00	4.930.370.918,00	1.454.309.015,00	5.285.190.729,00	0,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/Bulan	25	Orang/Bulan	28	Orang/Bulan	4.923.310.608,00	5.278.130.419,00	1.449.769.015,00	5.278.130.419,00	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	2	Dokumen	4 Dokumen	8.825.603,00	7.060.310,00	4.540.000,00	7.060.310,00	0,00	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100	%		171.645.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26	Paket	0	Paket	0 Paket	21.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	digeser ke sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			493.124.004,00	319.352.669,62	60.635.737,00	431.571.249,62	112.218.580,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	14.913.673,00	14.913.673,00	0,00	16.505.435,00	1.591.762,00	Penambahan Lampu Seri (Pergeseran dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	4 Paket	119.806.500,00	110.355.340,62	0,00	110.355.340,62	0,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	3 Paket	15.466.141,00	15.466.141,00	0,00	26.092.959,00	10.626.818,00	Penambahan Bendera Merah Putih & Bendera Lambang Garuda (Pergeseran dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	24.888.635,00	19.568.460,00	2.698.000,00	19.568.460,00	0,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	1.020.000,00	4.100.000,00	0,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	2 Paket	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	14.985.000,00	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	294.000.000,00	135.000.000,00	55.393.737,00	235.000.000,00	100.000.000,00	Pergeseran dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	25 Dokumen	100 Dokumen	4.964.055,00	4.964.055,00	1.524.000,00	4.964.055,00	0,00	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%			159.505.941,00	159.505.941,00	0,00	159.505.941,00	0,00		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	1	159.505.941,00	159.505.941,00	0,00	159.505.941,00	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%			685.267.620,00	685.267.620,00	147.552.976,00	685.267.620,00	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	Laporan	12	244.800.000,00	244.800.000,00	9.829.848,00	244.800.000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	Laporan	12	440.467.620,00	440.467.620,00	137.723.128,00	440.467.620,00	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%			237.148.000,00	237.148.000,00	37.654.600,00	237.148.000,00	0,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	unit	1	38.500.000,00	38.500.000,00	7.278.500,00	38.500.000,00	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	7	unit	25	180.000.000,00	180.000.000,00	26.896.100,00	180.000.000,00	0,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	3	Unit	25	18.648.000,00	18.648.000,00	3.480.000,00	18.648.000,00	0,00	Perubahan Indikator

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Desa mandiri pangan	1	Desa			623.121.798,00	601.377.718,00	3.700.000,00	601.377.718,00	0,00	
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%			623.121.798,00	601.377.718,00	3.700.000,00	601.377.718,00	0,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	183.820.400,00	169.126.320,00	0,00	169.126.320,00	0,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	Unit	0 Unit	1 Unit	439.301.398,00	432.251.398,00	3.700.000,00	432.251.398,00	0,00	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase cadangan pangan pemerintah	100	%			1.065.265.197,43	1.347.888.634,36	52.733.524,00	1.361.321.041,06	13.432.406,70	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	%			131.186.433,00	70.495.264,08	9.760.000,00	89.495.264,08	19.000.000,00	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	Unit	0 Unit	1 Unit	81.940.288,00	43.835.718,13	3.590.000,00	43.835.718,13	0,00	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	49.246.145,00	26.659.545,95	6.170.000,00	45.659.545,95	19.000.000,00	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Kecamatan untuk Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) (Pergeseran dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota)
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100	%			482.766.360,00	920.965.145,00	15.615.000,00	909.625.145,00	-11.340.000,00	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	25	Ton	0 Ton	55 Ton	407.190.000,00	857.190.000,00	0,00	857.190.000,00	0,00	Pergeseran belanja
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25	Ton	0 Ton	55 Ton	75.576.360,00	63.775.145,00	15.615.000,00	52.435.145,00	-11.340.000,00	Pengurangan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100	%			451.312.404,43	356.428.225,28	27.358.524,00	362.200.631,98	5.772.406,70	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	28.575.070,00	18.735.932,00	627.000,00	18.735.932,00	0,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	271.898.485,03	194.893.443,88	12.646.524,00	200.665.850,58	5.772.406,70	Terdapat pengurangan Honorarium, pengurangan belanja bahan pengganti pelatihan dan Penambahan Perjalanan Dinas ke Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bagi Produsen pengembangan Olahan Pangan Lokal (POPL) di Desa - indikator satu data/e-walidata (Pergeseran dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	150.838.849,40	142.798.849,40	14.085.000,00	142.798.849,40	0,00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	15	Desa			47.534.928,65	26.595.588,56	5.360.000,00	26.595.588,56	0,00	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%			47.534.928,65	26.595.588,56	5.360.000,00	26.595.588,56	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	Laporan	0 Laporan	1 Laporan	47.534.928,65	26.595.588,56	5.360.000,00	26.595.588,56	0,00	
Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	%			251.561.067,13	153.900.482,40	27.651.571,00	163.581.123,33	9.680.640,93	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100	%			251.561.067,13	153.900.482,40	27.651.571,00	163.581.123,33	9.680.640,93	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	127.864.061,24	83.226.928,99	11.364.000,00	92.907.569,92	9.680.640,93	Penambahan Belanja pangan segar untuk uji sampel (Pergeseran dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	123.697.005,89	70.673.553,41	16.287.571,00	70.673.553,41	0,00	
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	68.002	Ton			1.759.416.086,39	1.655.478.810,39	33.555.668,00	2.169.335.927,39	513.857.117,00	

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100	%			1.416.959.366,00	1.416.959.366,00	9.753.848,00	1.885.739.207,00	468.779.841,00	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	246.660.318,00	246.660.318,00	3.555.766,00	246.660.159,00	-159,00	pergeseran honor ke perjalanan dinas dan atk
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	762	Unit	0 Unit	803 Unit	1.170.299.048,00	1.170.299.048,00	6.198.082,00	1.639.079.048,00	468.780.000,00	penambahan penerima hibah mesin kapal perikanan (sudah diajukan TS ke Bupati)
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%			342.456.720,39	238.519.444,39	23.801.820,00	283.596.720,39	45.077.276,00	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	56	Orang	0 Orang	56 orang	289.111.473,39	204.315.473,39	5.140.000,00	228.511.473,39	24.196.000,00	Berkurang (penghapusan belanja penyertaan dan penambahan sppd)
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4	Kelompok	0 Kelompok	4 Kelompok	34.203.971,00	34.203.971,00	18.661.820,00	35.943.971,00	1.740.000,00	Bertambah (perjalanan dinas)
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2	Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	19.141.276,00	0,00	0,00	19.141.276,00	19.141.276,00	Bertambah (kegiatan sosialisasi)
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap	68.002	Ton			608.777.912,52	608.777.912,52	1.350.000,00	695.702.912,52	86.925.000,00	

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100	%			608.777.912,52	608.777.912,52	1.350.000,00	695.702.912,52	86.925.000,00	
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10	Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	608.777.912,52	608.777.912,52	1.350.000,00	695.702.912,52	86.925.000,00	Bertambah (perjalanan dinas, kajian dan horararoum tim terpadu
PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.457	Ton			859.811.444,00	752.453.076,00	3.713.315,00	752.453.076,00	0,00	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Capaian Pembudidayaan ikan kecil	100	%			138.739.216,00	49.730.848,00	2.062.000,00	49.730.848,00	0,00	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	Kelompok	0 Kelompok	10 Kelompok	49.730.848,00	49.730.848,00	2.062.000,00	49.730.848,00	0,00	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	89.008.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100	%			721.072.228,00	702.722.228,00	1.651.315,00	702.722.228,00	0,00	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	0 Unit	2 Unit	721.072.228,00	702.722.228,00	1.651.315,00	702.722.228,00	0,00	
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Hasil Olahan Perikanan	1.5	%			153.136.228,44	108.432.198,32	3.150.000,00	108.432.198,32	0,00	

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	100	%			153.136.228,44	108.432.198,32	3.150.000,00	108.432.198,32	0,00	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	25	Unit Usaha	0 Unit Usaha	25 Unit Usaha	153.136.228,44	108.432.198,32	3.150.000,00	108.432.198,32	0,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional sektor ketahanan pangan dan perikanan di Indonesia memiliki kerangka yang luas dan bertujuan mulia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, koordinasi yang baik antar pihak terkait, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Telaahan yang berkelanjutan terhadap kebijakan ini, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, sangat penting untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan dan sektor perikanan yang maju dan mensejahterakan.

Kebijakan nasional ketahanan pangan di Indonesia memiliki landasan kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pangan. Beberapa aspek telaahan penting meliputi :

1. Berorientasi pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan;
2. Fokus utama pada komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai (Pajale) untuk swasembada komoditas dan pengembangan komoditas lokal lainnya yang memiliki nilai gizi dan ekonomi;
3. Keamanan pangan mencakup regulasi terkait standar mutu, labelisasi, dan pengawasan produk pangan dan untuk memastikan implementasi yang efektif di seluruh rantai pasok, dari produksi hingga konsumsi;
4. Mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan gizi masyarakat. memaksimalkan program diversifikasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang masih memerlukan upaya yang lebih intensif.

Kebijakan nasional sektor perikanan memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan produksi dan daya saing, serta mensejahterakan masyarakat perikanan. Beberapa aspek telaahan penting meliputi :

1. Pengelolaan sumber daya perikanan berfokus pada keberlanjutan, termasuk penetapan zonasi, kuota penangkapan, dan pemberantasan Illegal Fishing;
2. Mendorong pengembangan perikanan budidaya sebagai alternatif dan pelengkap perikanan tangkap yang terfokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi spesies budidaya, dan praktik budidaya yang ramah lingkungan;

3. Meningkatkan daya saing produk perikanan melalui peningkatan mutu, pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran;
4. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir melalui program pelatihan, bantuan modal, akses terhadap teknologi, dan penguatan kelembagaan;
5. Mendorong penelitian dan pengembangan di bidang perikanan untuk mendukung inovasi teknologi, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan pengembangan produk bernilai tambah

Keterkaitan Antara Kebijakan sektor ketahanan pangan dan perikanan memiliki keterkaitan yang erat, yaitu :

1. Sumber Pangan :

Ikan merupakan sumber protein hewani yang penting dalam diversifikasi pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kebijakan perikanan yang berkelanjutan berkontribusi pada ketersediaan sumber pangan yang sehat;

2. Ekonomi Masyarakat :

Sektor perikanan merupakan sumber mata pencaharian penting bagi jutaan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pesisir. Kebijakan perikanan yang memberdayakan masyarakat berkontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga dan wilayah;

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam :

Kedua sektor ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak berkelanjutan di salah satu sektor dapat berdampak negatif pada sektor lainnya (misalnya, kerusakan lingkungan pesisir akibat praktik pertanian yang buruk dapat merusak habitat ikan);

4. Gizi Masyarakat :

Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi dan penting untuk memerangi stunting dan malnutrisi. Kebijakan perikanan yang mendukung produksi dan aksesibilitas ikan berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat yang merupakan bagian dari ketahanan pangan secara luas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Dan bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2024	Proyeksi 2025	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan	80,59 (2021)	82,15	82	82,15	82,30
		Meningkatnya Skor PPH	Skor PPH Komsumsi	88,6	91,5	91,0	91,5	92,0
			Skor PPH Ketersediaan	92,41	72,5	72,0	72,5	73,0
2	Meningkatkan laju pertumbuhan Sektor Pertanian dan perikanan		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	1,9	2,0	1,97	2,0	2,0
		Meningkatnya produksi perikanan	Hasil produksi perikanan (ton)	69.613	68.476	67.463	68.476	69.502
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	75,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola DKPP Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80,6	83,00	82,00	83,00	85,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berisi program-program prioritas yang merespon isu-isu strategis yang mengemuka. Rencana program prioritas selanjutnya disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, pilihan, dan fungsi penunjang.

Dari berbagai program prioritas yang telah disebutkan sesuai dengan urusan baik wajib maupun pilihan, hal tersebut sesungguhnya mengacu pada RPD 2024 - 2026. Pada tahun 2024, proyeksi program prioritas secara umum belum dilaksanakan mengingat pendanaan pembangunan pada tahun tersebut mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada pemerintahan periode sebelumnya (masa transisi). Secara umum, fokus pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 - 2026 ditujukan untuk pendanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran Perubahan 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan potensi, kendala, permasalahan serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan ini berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut masa periode 2024 - 2026. Agar tujuan yang akan dicanangkan berhasil maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut merencanakan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan 9 program yang meliputi 19 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan

Adapun Matrik Rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran Perubahan 2025 dapat dilihat pada Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN																				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.040.041.489,00	8.678.267.931,61	8.914.339.725,63	-125.701.763,37							12.232.084.201,00			
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							9.040.041.489,00	8.678.267.931,61	8.914.339.725,63	-125.701.763,37							12.232.084.201,00			
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DKPP				83 Nilai	83 Nilai	6.865.187.462,00	6.690.784.940,40	6.761.301.222,38	2.011.896.739,00							8.877.084.201,00			
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	11.962.385,00	11.958.164,40	9.528.096,40	-2.434.288,60			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			24.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.962.375,00	6.959.905,40	6.959.905,40	-2.469,60	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.010,00	4.998.259,00	2.568.191,00	-2.431.819,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.932.310.172,00	4.932.136.211,00	5.285.190.729,00	352.880.557,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			6.034.913.187,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	4.923.310.608,00	4.923.310.608,00	5.278.130.419,00	354.819.811,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			6.019.913.187,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	4 Dokumen	8.999.564,00	8.825.603,00	7.060.310,00	-1.939.254,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	82.477.500,00	171.645.000,00	0,00	-82.477.500,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			395.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	0 Paket	22.477.500,00	21.645.000,00	0,00	-22.477.500,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	60.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	549.146.532,00	493.124.004,00	384.660.835,98	-164.485.696,02			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.913.673,00	14.913.673,00	16.505.435,40	1.591.762,40	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	119.806.500,00	119.806.500,00	110.355.340,62	-9.451.159,38	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	15.466.141,00	15.466.141,00	26.092.958,75	10.626.817,75	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	24.888.635,00	24.888.635,00	19.568.460,00	-5.320.175,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	14.985.000,00	14.985.000,00	18.074.586,21	3.089.586,21	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	294.000.000,00	185.000.000,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.986.583,00	4.964.055,00	4.964.055,00	-22.528,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	366.042.753,00	159.505.941,00	159.505.941,00	-206.536.812,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	0 Unit	166.962.293,00	0,00	0,00	-166.962.293,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	199.080.460,00	159.505.941,00	159.505.941,00	-39.574.519,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	685.267.620,00	685.267.620,00	685.267.620,00	0,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			748.171.014,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.800.000,00	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	440.467.620,00	440.467.620,00	440.467.620,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			498.171.014,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	237.980.500,00	237.148.000,00	237.148.000,00	-832.500,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			475.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	25 Unit	19.480.500,00	18.648.000,00	18.648.000,00	-832.500,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Desa mandiri pangan				1 Desa	1 Desa	641.431.021,00	623.121.798,00	601.377.718,00	508.568.979,00							1.150.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	641.431.021,00	623.121.798,00	601.377.718,00	-40.053.303,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat Kabupaten Tanah Laut		1.150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	195.999.623,00	183.820.400,00	169.126.320,00	-26.873.303,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Panggung Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Padang Kab. Tanah Laut, Bati Bati, Benua Raya Kab. Tanah Laut, Panyipatan, Batakan Kab. Tanah Laut, Tambang Ulang, Sungai Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	1 unit	445.431.398,00	439.301.398,00	432.251.398,00	-13.180.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase cadangan pangan pemerintah				100 %	100 %	1.179.777.401,00	1.065.265.197,43	1.361.317.573,36	315.222.599,00							1.495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase capaian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	206.597.572,00	131.186.433,00	89.495.264,08	-117.102.307,92			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat Kabupaten Tanah Laut		485.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	139.245.177,00	81.940.288,00	43.835.718,13	-95.409.458,87	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	67.352.395,00	49.246.145,00	45.659.545,95	-21.692.849,05	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	488.306.445,00	482.766.360,00	909.625.145,00	421.318.700,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Masyarakat Kabupaten Tanah Laut		560.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				24,9 Ton	55 Ton	407.491.500,00	407.190.000,00	857.190.000,00	449.698.500,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				2,5 Ton	55 Ton	80.814.945,00	75.576.360,00	52.435.145,00	-28.379.800,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				100 %	100 %	484.873.384,00	451.312.404,43	362.197.164,28	-122.676.219,72			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	37.213.813,00	28.575.070,00	18.735.932,00	-18.477.881,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	287.662.682,00	271.898.485,03	200.662.382,88	-87.000.299,12	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			265.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	159.996.889,00	150.838.849,40	142.798.849,40	-17.198.039,60	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan				14 Desa	14 Desa	79.945.163,00	47.534.928,65	26.595.588,56	270.054.837,00							350.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	79.945.163,00	47.534.928,65	26.595.588,56	-53.349.574,44			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	79.945.163,00	47.534.928,65	26.595.588,56	-53.349.574,44	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan				100 %	100 %	273.700.442,00	251.561.067,13	163.747.623,33	86.299.558,00							360.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	273.700.442,00	251.561.067,13	163.747.623,33	-109.952.818,67				02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			360.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	140.701.520,00	127.864.061,24	93.074.069,92	-47.627.450,08	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	132.998.922,00	123.697.005,89	70.673.553,41	-62.325.368,59	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.394.250.362,00	3.381.141.671,35	3.191.390.977,23	797.140.615,23							2.360.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.394.250.362,00	3.381.141.671,35	3.191.390.977,23	797.140.615,23							2.360.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				68.002 Ton	68.002 Ton	1.745.178.531,00	1.759.416.086,39	1.678.927.886,39	-470.178.531,00							1.275.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	1.280.466.286,00	1.416.959.366,00	1.524.758.442,00	244.292.156,00				02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	2 Dokumen	58.260.840,00	246.660.318,00	246.660.159,00	188.399.319,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				799 Unit	722 Unit	1.222.205.446,00	1.170.299.048,00	1.278.098.283,00	55.892.837,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	464.712.245,00	342.456.720,39	154.169.444,39	-310.542.800,61				02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			575.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pembangunan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				90 Orang	40 Orang	389.988.202,00	289.111.473,39	124.245.473,39	-265.742.728,61	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya				4 Kelompok	4 Kelompok	49.994.227,00	34.203.971,00	29.923.971,00	-20.070.256,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	24.729.816,00	19.141.276,00	0,00	-24.729.816,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				1.457 Ton	1.457 Ton	349.600.222,00	859.811.444,00	752.453.076,00	435.399.778,00							785.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Capaian Pembudidayaan ikan kecil				100 %	100 %	154.963.869,00	138.739.216,00	49.730.848,00	-105.233.021,00				02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			260.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pembangunan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	59.990.501,00	49.730.848,00	49.730.848,00	-10.259.653,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	0 Kelompok	94.973.368,00	89.008.368,00	0,00	-94.973.368,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Capaian Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				100 %	100 %	194.636.353,00	721.072.228,00	702.722.228,00	508.085.875,00			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			525.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	194.636.353,00	721.072.228,00	702.722.228,00	508.085.875,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				68.002 Ton	68.002 Ton	124.472.848,00	608.777.912,52	651.577.816,52	527.152,00							125.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				100 %	100 %	124.472.848,00	608.777.912,52	651.577.816,52	527.104.968,52			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	124.472.848,00	608.777.912,52	651.577.816,52	527.104.968,52	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Hasil Olahan Perikanan				1,5 Persen	1,5 Persen	174.998.761,00	153.136.228,44	108.432.198,32	1.239,00							175.000.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase capaian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala				100 %	100 %	174.998.761,00	153.136.228,44	108.432.198,32	-66.566.562,68			-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	174.998.761,00	153.136.228,44	108.432.198,32	-66.566.562,68	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi 02. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
			J U M L A H						11.434.291.851,00	12.059.409.602,96	12.105.730.702,86	545.381.893.887,43							14.592.084.201,00	

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen detail dari RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2024-2026 dan merupakan suatu dokumen yang telah disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indikator yang terdapat dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 merupakan indikator dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan namun dalam hal pendanaan masih merupakan pagu indikatif.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan, tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Perubahan RENJA melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, petani dan masyarakat pada umumnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat terwujud.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TANAH LAUT**

Nomor : 500.1 / 39 / DKPP / 2025

TENTANG

**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TANAH LAUT**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran VI bagian E poin E.2 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b bahwa untuk melegalkan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

- 12 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Tanah laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
- 13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

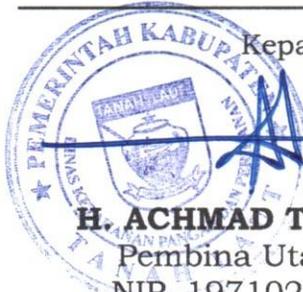
Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- Kedua : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 20 Mei 2025

Kepala Dinas,



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Tanah
Laut

Nomor : 500.1/ 39 /DKPP/2025

Tanggal : 20 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ketua
3	Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
4	Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
5	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
6	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
7	Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
8	Staf Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota



Pelaihari, 20 Mei 2025
Kepala Dinas

H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003